

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Seno, Indriyanto, 2001, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atmaja, P. Soeria, Arifin, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik dan Saran*, Rajawali Press, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Parjudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalila Indonesia, Jakarta
- Black, Campbell, Henry, 2014, *Black's Law Dictionary Tenth Edition*, West Publishing Co., Minnesota.
- Bohari, 2016, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Press, Depok.
- Hadjon, M, Philipus, 1985, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya
- _____, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Surabaya
- Husen, Yunus, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta
- Kasiyanto, Agus, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Surabaya.
- Makawimbang, Ferry, Harnold, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta
- _____, 2015, *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta.

- Marzuki, Mahmud, Peter, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poedjawijatna, L. R 1992, *Logika Filsafat Berpikir*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R, Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor.
- Ryan, Albert, 2011, *Buku Pegangan Pengadaan Barang dan Jasa*, Gradien Mediatama, Yogyakarta
- Saidi, Djafar, Muhammad, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press, Bandung.
- Saputra, Nata, M, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, S.W, Maria, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.
- Suswinarko, 2012, *Aman dari Resiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakkarta
- _____, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tuanakotta, M, Theodorus, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Witanto, Y. D, 2012, *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Mandar Maju, Bandung

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Keputusan BPK RI Nomor 17/K/I-XII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Made Wira Suhendra, 2017, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Polres Sleman", *Tesis*, Program Studi

Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, tidak
dipublikasi, Yogyakarta.

R.r Larasati, 2011, "Tanggung Jawab Hukum Tentang Keuangan Negara Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Tesis*, Program Studi Magister
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Tunggoro Widiandaru, 2011, "Analisis Hukum Kewenangan Auditor Badan Pengawas
Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan
Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Yogyakarta Nomor 64/PDT.G/2009/PN YK", *Tesis*, Program Studi
Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dewi sekar R, 2016, "Implikasi Perbedaan Penghitungan Nilai Kerugian Negara Dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Dengan Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Kerugian
Negara", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Simamora, Sogar, Yohanes, 2005, "Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang
dan Jasa oleh Pemerintah", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas
Airlangga, Surabaya

Saiful, Anwar, 2017, Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
(Bpkp) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah
Pemerintah Daerah Kepada Koni), *Tesis*, Program Studi Magister Hukum
Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

"Plt. Kadis Diskominfo Kota Pasuruan Diadili Karena Diduga Korupsi Rp. 108
Juta" dalam [http://www.beritakorupsi.co/2021/02/plt-kadis-
diskominfo-kota-pasuruan.html?m=1](http://www.beritakorupsi.co/2021/02/plt-kadis-diskominfo-kota-pasuruan.html?m=1) diakses pada 30 Maret 2021

Kebocoran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
<http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3029> diakses 2 April 2021

Indeks Prestasi Korupsi Indonesia pada 2020 Melorot 3 Poin dalam
[https://www.antaranews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-
indonesia-pada-2020-melorot-3-poin](https://www.antaranews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin) diakses 4 April 2021

Muhammad Hatta Ali dalam "Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Keuangan
Negara, SEMA pun Tak Mengikat" [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-
berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat/)
diakses 7 April 2021

Pengadilan Tipikor Jakarta, Yohanes Priyana dalam
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ac1253a9228/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat>
diakses 7 April 2021

Ahli dalam <https://kbbi.web.id/ahli> diakses 3 April 2021

Pakar dalam <https://kbbi.web.id/pakar> diakses 3 April 2021

E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 09/G/2015/PTUN-SBY